

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK  
PARIWISATA PULAU PENYENGAT  
KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Syafri Harto**

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek pariwisata Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan populasi seluruh warga yang berdomisili di Pulau Penyengat, sedangkan sampel terbagi dalam 2 subjek yaitu pemerintah dan masyarakat.*

*Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka hasil yang di dapat yaitu mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan objek atau pengelolaan di kawasan objek wisata Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat kekurangan dan dibutuhkan perhatian pemerintah serta kerjasama masyarakat dalam mengembangkan objek wisata di kawasan tersebut, hal ini disebabkan kurangnya pemberdayaan potensi sumberdaya manusia di kawasan Pulau Penyengat.*

*Pulau Penyengat yang tidak begitu luas sebenarnya bukan menjadi kendala bagi dunia pariwisata untuk mengembangkan daya tarik wisata dan keunikan dari daerah wisata tersebut. Pulau Penyengat yang sudah menjadi objek wisata unggulan seharusnya bisa mendatangkan banyak wisatawan berkunjung.*

*Kata kunci : Peran Masyarakat, Wisata, Pulau Penyengat.*

**PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan sektor yang amat penting perkembangannya dalam menambah sumber pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada sistem pembangunan ekonomi bagi daerah itu sendiri. Pariwisata meliputi berbagai

aspek, antara lain pelaku wisata dan daya tarik wisata. Pelaku wisata, menurut Inpres No. 9 T ahu 1969, "wisatawan (tourist) adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungannya itu".

Menurut Undang-Undang No. 10 T ahu 2009 tentang Kepariwisata menerangkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata di Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu industry yang telah berdiri sendiri semenjak dewasa ini. Tumbuh dan berkembangnya pariwisata di Indonesia sejalan dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan ini telah dapat menambah pendapatan dan penerimaan negara yang cukup besar di luar migas. Sektor pariwisata memiliki arti penting bagi perekonomian nasional dan sebagai salah satu komoditas andalan yang baik untuk menopang perekonomian daerah.

Melihat besarnya potensi Indonesia dalam sektor Pariwisata, menuntut pemerintah untuk memahami hal tersebut lebih kompleks dan mendalam. Salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian akan pariwisata adalah Provinsi Kepulauan Riau. Semenjak berpisahnya, Kepulauan Riau dengan induk provinsinya yaitu provinsi Riau pada tahun 2002, menjadikan Kepulauan Riau memiliki aset yang sangat melimpah ruah dibidang Pariwisata. Karena 60% kawasan Kepulauan Riau merupakan perairan, maka menjadikan Kepulauan Riau terkenal akan sektor pariwisata dibidang bahari yang menjanjikan. Disisi lain, Kepulauan Riau yang merupakan Bunda Tanah Melayu memiliki segudang adat-istiadat, objek wisata yang memiliki nilai sejarah serta atraksi wisata yang dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Tidak cukup sampai disitu pulau-pulau nan eksotis ditambah kearifan lokal yang terkandung didalamnya menjadikan Kepulauan Riau menjelma menjadi destinasi baru bagi Indonesia untuk dipromosikan ke mancanegara.

Melihat permasalahan Pulau Penyengat dan isinya yang memiliki luas kurang lebih 3,5 km<sup>2</sup> ini sebenarnya dapat diatasi tanpa harus menunggu Perda dari pemerintah daerah. Pengelolaan fasilitas atau amenitas oleh masyarakat

setempat dan kepekaan warga yang berada di Pulau Penyengat ini adalah kunci utama untuk mengelola dan menjaga kelestarian dari situs sejarah tersebut.

### **PENGELOLAAN PARIWISATA**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, pengelolaan berarti suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian manfaat. Hersey dan Blanchard dalam Sudjana (2000:17) memberi arti pengelolaan sebagai berikut ”Management as working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals”, dengan maksud bahwa pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Perencanaan berarti memperhitungkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Perencanaan dan pengelolaan pariwisata berarti untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu kecenderungan pertumbuhan penduduk, persediaan lahan cadangan, pertumbuhan fasilitas dan kemajuan teknologi dengan penerapannya harus dimasukkan dalam perencanaan tersebut.

Selain itu kualitas sumber daya pengelolaan pariwisata juga sangat berpengaruh pada kemajuan dari industri pariwisata tersebut, sebab dalam mengelola/memanajemen pariwisata sangat memerlukan keahlian dan pengalaman seperti yang dikemukakan oleh Salim (1981:223) bahwa “Berapapun banyak modal yang dimiliki, pembangunan tidak akan terlaksana kecuali disertai dengan sumber daya managerial yang mampu mengelola modal itu untuk pembangunan”.

Soewarno (2002:378) mengemukakan bahwa “ Pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran”.

Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas hayati dan non hayati, dimana masing masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan. Tujuan perencanaan dan pengembangan pariwisata yang lebih lanjut demi meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang bisa tercapai semaksimal mungkin apabila pemerintah ikut berperan. Peranan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata sangat menentukan berkembang atau tidaknya suatu objek wisata.

Berkembang suatu kawasan objek wisata tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan melalui kerjasama para stakeholder kepariwisataan yakni

masyarakat dan pemerintah. Munasef (1995:1) menyatakan bahwa “ Pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan.”

Pengembangan pariwisata di suatu wilayah ditentukan oleh tiga faktor yaitu tersedianya objek dan atraksi wisata, aksesibilitas dan fasilitas amenities. Adapun A.Yoeti (1990:285) menyatakan bahwa “ Ada tiga faktor yang dapat menentukan berhasilnya pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, ketiga faktor tersebut diantaranya tersedianya objek atraksi wisata, adanya fasilitas aksesibilitas dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Sedangkan amenities yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian ditempat-tempat tersebut serta alat komunikasi.

Middleton (2001:122) memberikan pengertian produk wisata yaitu “The tourist products to be considered as an amalgam of three main components of attraction, facilities at the destination and accessibility of the destination”. Dari pengertian di atas kita dapat melihat bahwa produk wisata secara umum terbentuk disebabkan oleh tiga komponen utama yaitu atraksi wisata, fasilitas di daerah tujuan wisata dan aksesibilitas.

### **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian merupakan perencanaan, struktur dan strategi penelitian dalam menjawab pertanyaan dan mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi. Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut Sugiyono (2009) penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan melalui hasil wawancara dan pengamatan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Daya Tarik Wisata yang Dirasakan**

Sebagaimana yang telah disampaikan penulis diatas bahwa masyarakat cenderung memikirkan income yang besar daripada keberlangsungan perkembangan dar pariwisata itu sendiri. Penulis menilai bahwa masyarakat selama ini belum menerima pariwisata dapat menjadi sumber penghidupan mereka dan mereka yang sudah menerima belum mau melanjutkan pengelolaan tersebut dikarenakan kurangnya skill, kreatifitas, kecemburuan sosial, keinginan untuk memperoleh dengan cara instan dan juga perlu adanya pancingan dari pemerintah baik ide dana dan tindakan. Sehingga mereka sudah merasa puas akan hasil yang didapatkan.

Seperti transportasi becak motor yang telah diberikan pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak 18 dan juga dana perbaikan bagi pemilik pompong mereka merasa cukup untuk menghidupi kehidupan mereka saat ini. Sedangkan masyarakat lainnya merasa bernelayan mencari ikan adalah pekerjaan yang sudah turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sehingga kebanyakan mereka tidak berdiam di Pulau Penyengat, terlebih bagi masyarakat yang bekerja di Pegawai Negeri dan perusahaan lainnya diluar Pulau Penyengat.

Hal tersebut yang membuat masyarakat sulit untuk melakukan atau menciptakan atraksi wisata bagi para prngunjung. Selama ini atraksi yang dibuat selalu dimulai dari pihak Tour dan Travel. Sehingga masyarakat adalah objek dari atraksi tersebut.

Kurangnya ruang gerak yang terjadi juga dirasakan penulis saat malam hari. Mereka banyak berdiam dirumah dan juga memilih untuk beristirahat untuk mempersiapkan berkerja besok harinya. Hal ini yang membuat daya tarik Pulau Penyengat tidak berkembang, selama ini pengunjung hanya menikmati objek wisata cagar budaya saja dan kembali lagi ke Tanjungpinang pada hari yang sama.

### **5 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata**

Masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Pulau Penyengat yang mana bersentuhan langsung dalam kegiatan pariwisata karena adanya benda cagar budaya yang dilindungi maka memiliki peran sebagai pengelola. Masyarakat Pulau Penyengat memiliki andil besar dalam merawat, menjaga, mengelola dan mengembangkan objek wisata Pulau Penyengat agar meningkatkan kunjungan wisatawan.

Dalam RIPPDA Kepulauan Riau 2012-2022 yang mana mengambil pola pengembangan pariwisata berkelanjutan disebutkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata yang mana dapat diartikan elemen-

elemen yang dapat mengembangkan dan membawa pariwisata Pulau Penyengat salah satunya masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Penyengat itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, masyarakat Pulau Penyengat sebenarnya telah menyadari bahwa mereka hidup di dalam kawasan perlindungan cagar budaya yang mana mereka juga harus menjaga dan juga harus merasa memiliki bahwa amenities atau fasilitas wisata tersebut adalah tugas bersama yang harus dijaga dan dirawat. Dalam hal ini peran masyarakat dalam pengelolaan amenities sangatlah penting. Masyarakat sudah menyadari untuk tidak merusak, mengambil atau menghancurkan apapun termasuk yang ada di area pengelolaan amenities tersebut.

Namun pemerintah dalam hal ini memiliki skala sendiri untuk mengukur peran masyarakat dalam pengelolaan. Sejauh ini apabila pemerintah melakukan pemugaran dan juga membangun sesuatu yang bermanfaat maka pemerintah selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan ide dan keputusan dan juga masyarakat dengan senang hati membantu dalam pengelolaan amenities tersebut. Akan tetapi peran yang besar tersebut tidak akan berlangsung lama apabila pemerintah tidak menunjuk secara langsung kepada beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengelola hal tersebut tentunya kewajiban mereka diiringi dengan hak mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai bahwa sejauh ini masyarakat mau terlibat dalam pengelolaan baik secara pribadi dan juga atas arahan dari pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh ibu Ima 47 tahun yang bekerja sebagai penjual makanan dan bunga rampai di depan objek wisata pemandian putri. Ia selalu menjaga dan mengawasi bagi pengunjung atau anak-anak yang merusak atau mencoret-coret bangunan dan area dari amenities itu sendiri walaupun secara langsung ibu Ima tidak mendapat arahan dari pemerintah untuk menjaga hal tersebut.

Disisi lain pemerintah yang telah menunjukkan 1 orang dari masyarakat yang berperan sebagai juru kunci di setiap cagar budaya untuk mengelola dan bertanggung jawab atas amenities tersebut telah berperan secara baik sesuai dengan tugas pokok mereka masing-masing.

Apabila dilihat dari sisi kekurangannya, masyarakat masih kurang peka terhadap kebersihan lingkungan. Masih banyak plastic-plastik dan kantong makanan yang berserakan di jalanan atau di area penjualan makanan. Hal itu dapat juga diakibatkan oleh faktor pengunjung yang tidak menyadari akan kebersihan lingkungan dan juga kesadaran pemilik area tersebut. Disamping itu disepanjang pinggir pantai di area dermaga juga terlihat sampah-sampah yang dibawa ombak. Walaupun gotong royong yang selalu dilaksanakan oleh RT dan RW atas arahan lurah setempat selalu dilaksanakan bersama-sama, namun kesadaran ini belum muncul dari masyarakat itu sendiri setiap harinya. Bukti tersebut bisa penulis

temukan beberapa pemuda yang membeli makanan sehabis sholat Jumat yang dilaksanakan di Mesjid Penyengat, dan membuang sampah plastik tidak pada tempatnya.

Berdasarkan informasi dan pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sejauh ini sudah memiliki kesadaran dan peran sebagai pengelola objek wisata yang ada di Pulau Penyengat. Pemerintah juga sudah menjalankan regulasi-regulasinya dalam pemeliharaan, pelestarian dan pengelolaan tersebut. Namun dalam hal ini ada beberapa sisi yang masih belum diperhatikan antara lain kebersihan sampah yang ada di area objek wisata Pulau Penyengat yang wajib mengutamakan sapta pesona dan juga peran masyarakat dalam mengembangkan pariwisata itu sendiri, baik masyarakat sebagai seorang informan (guide) dan juga secara berkelanjutan dalam mengelola wisatawan yang ingin menginap dan juga atraksi yang diberikan.

Selama ini pengunjung hanya menikmati objek wisata saja tanpa melihat adanya beberapa atraksi wisata. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini telah memberikan bantuan berupa alat-alat music Ghazal yang diberikan ke salah satu sanggar yang ada di Pulau Penyengat, hanya setahun setelah itu kegiatan yang dilaksanakan di Panggung Rakyat dengan membuka musik dan tari saat weekend mulai dari jam 10 hingga jam 2 ini sudah tidak aktif hingga sekarang. Sehingga wisatawan terbatas untuk menikmati objek wisata di Pulau Penyengat dan bahkan merasa bosan.

### **KESIMPULAN**

Dari penjelasan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa : Pengelolaan amenitas di kawasan objek wisata Pulau Penyengat berdasarkan analisa penulis yang diambil berdasarkan teori yang dikemukakan Middleton dan diambil indikator-indikator amenitas yang dikelola masyarakat Pulau Penyengat seperti Penginapan Sultan, Rumah Makan, Transportasi Becak Motor, Toko Souvenir, Rumah Ibadah dan Gazebo membuktikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya berperan dalam pengelolaan amenitas. Terlebih organisasi yang telah dibuat pemerintah seperti PNPM Mandiri, Karang Taruna, KUBE tidak berjalan dengan lancar dengan kata lain mereka hanya menjadi anggota dan aktif ketika hanya mendapatkan bantuan dan arahan dari pemerintah.

Pengelolaan amenitas yang ada di kawasan objek wisata Pulau Penyengat dalam kenyataannya masih kurang baik. Masyarakat setempat masih merasakan bahwa mereka yang berdomisili disana tidak menganggap bahwa Pulau Penyengat memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan ekonomi mereka seperti pengelolaan amenitas pada Penginapan Sultan, dan Gazebo. Pemerintah dalam hal ini memang berkewajiban untuk selalu menstimulus dan juga membantu pengembangan Pulau

Penyengat sebagai wisata unggulan Kota Tanjungpinang melalui dana baik benda maupun uang. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih menunggu dan menerima hal itu secara mentah saja tanpa mengelolakan amenitas menjadi lebih baik lagi. Berbeda dengan pengelolaan amenitas pada Transportasi Becak Motor Rumah Makan, Toko Souvenir dan Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat yang telah berjalan dengan baik dengan pengelolaan yang jelas struktur organisasi serta kepengurusannya dan juga membantu perekonomian masyarakat Pulau Penyengat.

Pemerintah sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pembuat regulasi dan juga pelaksana, sebagaimana bukti-bukti yang telah diambil berdasarkan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah yang terkait, kemudian dibandingkan dengan RIPPDA yang dibuat oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau ditemukan bahwa sejauh ini pemerintah telah melaksanakan tugasnya sebagaimana arahan yang tertuang dalam konsep RIPPDA Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable development). Pengembangan tersebut juga melibatkan masyarakat sebagai pengelola, dan masyarakat sendiri yang merasakan manfaatnya secara langsung.

Latar belakang masyarakat yang masih memiliki hubungan saudara satu sama lain sehingga kecemburuan sosial yang tinggi membuat masyarakat Pulau Penyengat lebih memilih untuk diam daripada merusak hubungan mereka satu sama lain. Sehingga timbul sikap apatis yang menyebabkan rasa untuk tumbuh dan maju menjadi kurang. Disisi lain masyarakat masih menilai menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah pekerjaan yang layak dan pasti serta menjanjikan untuk keluarga mereka daripada menjadi pelaku wisata dan pengelola amenitas yang ada di Pulau Penyengat.



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenade Media
- Christie Mill, Robert. 2000. *Tourism The International Bussiness*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Demartoto, Argyo. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Fandeli, Chafid. 1995. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataaan Alam*. Yogyakarta: Liberty Offset
- Foster, Dennis L. 2000. *Travel & Tourism*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gromang, Frans. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan (Tourism Management)*. Jakarta: PT. Perca
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengatur Pariwisata*. Bandung: Alfabetha
- Pariata, Westra. 1981. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Pendit, S Nyoman. 2006. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT Malta Pratindo
- Sopiah, dkk. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Betha
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Suwantoro, Gamal. 2000. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Tjipto, Fandy. 1996. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wahab, Salah. 2003. *Manamen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Perca



- Wariyanta. 2007. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Yoeti, Oka A. 2006. *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya*. Jakarta: PT Malta Pratindo
- Yoeti, Oka A. 1995. *Tours and Travel Management*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita